



Research Article

Pengembangan Literasi dan Numerasi: Studi Perbandingan Antara Indonesia dan Australia

Nurul Awalliyah¹, Barokah Rahma², Ika Kurnia Sofiani³

1. Jurusan Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, Indonesia; nurulawalliyah87@gmail.com
2. Jurusan Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, Indonesia; rahmahbarokah321@gmail.com
3. Jurusan Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, Indonesia; ikur.wafie@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Responsive: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : February 15, 2025
Accepted : April 19, 2025

Revised : March 23, 2025
Available online : May 27, 2025

How to Cite: Nurul Awalliyah, Barokah Rahma, & Ika Kurnia Sofiani. (2025). Literacy and Numeracy Development: A Comparative Study Between Indonesia and Australia. *Responsive: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 131-144. <https://doi.org/10.61166/responsive.v1i2.14>

Literacy and Numeracy Development: A Comparative Study Between Indonesia and Australia

Abstract. This study compares literacy and numeracy development policies and practices between Indonesia and Australia, focusing on national assessments, learning strategies, and teacher quality and professional development. In Australia, the National Assessment Program-Literacy and Numeracy (NAPLAN) is the main instrument in monitoring student achievement and promoting data-driven interventions. Indonesia, on the other hand, is implementing the National Assessment and Merdeka Curriculum in response to the challenges of 21st century education quality and relevance. Indonesia struggles with infrastructure inequality, teacher quality and policy implementation readiness, while Australia faces education disparities between urban and rural communities and indigenous groups. This research uses a desk study approach to analyze policy documents, scholarly publications and official reports from both countries. The results show that strengthening literacy and numeracy requires a systemic approach that includes flexible curriculum planning, informative assessments, ongoing teacher training and the use of data for continuous improvement. This cross-country study

provides important insights for policymakers and education practitioners in designing contextualized and sustainable education quality improvement strategies, especially in strengthening students' essential competencies to face global challenges.

Keywords: Literacy, Numeracy, Comparative Study, Indonesia, Australia

Abstrak. Penelitian ini membahas perbandingan kebijakan dan praktik pengembangan literasi dan numerasi antara Indonesia dan Australia, dengan fokus pada asesmen nasional, strategi pembelajaran, serta kualitas dan pengembangan profesional guru. Di Australia, National Assessment Program–Literacy and Numeracy (NAPLAN) menjadi instrumen utama dalam memantau capaian siswa dan mendorong intervensi berbasis data. Di sisi lain, Indonesia mengimplementasikan Asesmen Nasional dan Kurikulum Merdeka sebagai respons terhadap tantangan mutu dan relevansi pendidikan abad ke-21. Indonesia berjuang dengan ketimpangan infrastruktur, kualitas guru, dan kesiapan implementasi kebijakan, sedangkan Australia menghadapi kesenjangan pendidikan antara komunitas urban dan pedesaan, serta kelompok masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka untuk menganalisis dokumen kebijakan, publikasi ilmiah, dan laporan resmi dari kedua negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa penguatan literasi dan numerasi membutuhkan pendekatan sistemik yang mencakup perencanaan kurikulum yang fleksibel, asesmen informatif, pelatihan guru yang berkelanjutan, dan penggunaan data untuk perbaikan berkelanjutan. Studi lintas negara ini memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan dan praktisi pendidikan dalam merancang strategi peningkatan mutu pendidikan yang kontekstual dan berkelanjutan, khususnya dalam penguatan kompetensi esensial siswa sebagai bekal menghadapi tantangan global.

Kata Kunci: Literasi, Numerasi, Studi Perbandingan, Indonesia, Australia

PENDAHULUAN

Abad ke-21 dikenal sebagai era globalisasi atau era keterbukaan. Pada masa ini, kehidupan manusia mengalami transformasi mendasar yang sangat berbeda dibandingkan dengan pola hidup pada abad-abad sebelumnya. Abad ini ditandai oleh perubahan yang cepat dan tak terduga dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, transportasi, teknologi, komunikasi, dan informasi. Percepatan perubahan ini bisa membawa manfaat besar jika dimanfaatkan secara tepat, namun juga berpotensi menimbulkan bencana apabila tidak diprediksi dan dikelola secara sistematis, terstruktur, dan terukur.¹ Literasi dasar yang mencakup literasi membaca, numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi keuangan, serta literasi budaya dan kewarganegaraan merupakan fondasi utama untuk membangun kompetensi lanjutan seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Di antara semua bentuk literasi tersebut, kemampuan literasi dan numerasi memiliki peran sentral karena menjadi dasar dalam menghadapi tantangan kehidupan dan dunia kerja.²

Literasi dan numerasi merupakan fondasi penting dalam pendidikan dasar yang menentukan kualitas pembelajaran pada jenjang selanjutnya. Di era globalisasi

¹ Suciati Sudarisman, "Memahami hakikat dan karakteristik pembelajaran biologi dalam upaya menjawab tantangan abad 21 serta optimalisasi implementasi kurikulum 2013," *Florea: Jurnal Biologi dan Pembelajarannya*, 2.1 (2015).

² Anggun Winata, Ifa Seftia Rakhma Widiyanti, dan Sri Cacik, "Analisis kemampuan numerasi dalam pengembangan soal asesmen kemampuan minimal pada siswa kelas XI SMA untuk menyelesaikan permasalahan science," *Jurnal Educatio Fkip Unma*, 7.2 (2021), 498–508.

dan digitalisasi, kemampuan membaca, menulis, dan berhitung tidak hanya menjadi tuntutan akademik, tetapi juga kompetensi esensial dalam kehidupan masyarakat modern. Indonesia dan Australia memiliki tantangan dan strategi yang berbeda dalam pengembangan literasi dan numerasi, yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pembelajaran lintas negara. Untuk membantu para pendidik memahami persamaan dan perbedaan antar sistem pendidikan global, serta memberikan masukan kepada otoritas pendidikan dalam menyusun atau merevisi sistem yang ada demi pencapaian tujuan yang lebih optimal, digunakan klasifikasi pendidikan standar internasional. Klasifikasi ini memungkinkan analisis perbandingan antara sistem pendidikan di berbagai negara. Selain itu, perbandingan tersebut juga dapat mencakup aspek-aspek seperti tingkat keamanan, tingkat diferensiasi, pendekatan paradigma, dan proses pembelajaran yang diterapkan dalam masing-masing sistem.³ Oleh karena itu, penelitian pendidikan dapat memperoleh manfaat melalui perbandingan sistem pendidikan antara Indonesia dan Australia, guna mendorong perbaikan pada kedua sistem.

Melalui studi lintas negara, negara peserta memperoleh perspektif yang lebih luas untuk mengevaluasi keyakinan, sikap, serta praktik implisit mereka sendiri. Selain itu, studi perbandingan juga membuka peluang untuk memahami alternatif pendekatan pembelajaran, kerangka kurikulum, pola organisasi sekolah, dan sistem pendidikan lainnya yang mungkin tidak tersedia dalam konteks lokal tertentu.⁴ Masalah literasi dan numerasi merupakan isu penting yang mencerminkan kualitas pendidikan suatu negara. Sebagian besar siswa belum menguasai kemampuan dasar untuk memahami teks atau menyelesaikan permasalahan numerik secara efektif. Sebaliknya, Australia menunjukkan performa yang lebih baik dalam asesmen internasional. Sebagai respons, Australia memiliki program seperti *National Literacy and Numeracy Learning Progressions* dan *NAPLAN (National Assessment Program-Literacy and Numeracy)* yang digunakan untuk memantau capaian siswa secara nasional dan memberikan intervensi berbasis data bagi sekolah dan guru. Perbandingan antara Indonesia dan Australia menunjukkan bahwa meskipun Australia memiliki capaian yang lebih tinggi, keduanya menghadapi tantangan dalam pemerataan kualitas pendidikan. Melalui perbandingan ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan mendalam mengenai pendekatan, kebijakan, dan praktik terbaik yang diterapkan di masing-masing negara. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menarik pelajaran lintas negara yang dapat dijadikan dasar dalam merumuskan strategi peningkatan mutu pendidikan, khususnya dalam memperkuat kompetensi literasi dan numerasi siswa sebagai bagian dari kesiapan menghadapi tantangan abad ke-21.

METODOLOGI PENELITIAN

³ Muhammad Ilyas, Marufi Marufi, dan Nisraeni Nisraeni, "Metodologi penelitian pendidikan matematika" (Pustaka Ramadhan, 2015).

⁴ Rilla Gina Gunawan et al., "Studi Komparatif Kurikulum Matematika Sekolah Dasar Indonesia dan Australia," *Jurnal Education And Development*, 12.1 (2024), 401-7.

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau studi kepustakaan, yakni pendekatan yang mengandalkan penelusuran dan telaah terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan untuk menggali data dan informasi. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang bersifat deskriptif-komparatif dalam membandingkan strategi pengembangan literasi dan numerasi antara Indonesia dan Australia. Data dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen kebijakan pendidikan, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta publikasi resmi dari lembaga pemerintah dan non-pemerintah di kedua negara. Analisis dilakukan dengan mengkaji secara sistematis berbagai sumber tersebut untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta potensi pembelajaran yang dapat diambil dari masing-masing pendekatan. Dengan metode ini, penelitian bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai kebijakan dan praktik pengembangan literasi dan numerasi dalam konteks pendidikan Indonesia dan Australia.

PEMBAHASAN

Kebijakan Pendidikan Nasional

Di Indonesia, kebijakan pengembangan literasi dan numerasi difokuskan melalui program "Merdeka Belajar" dan Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran kontekstual dan berpihak pada murid. Pemerintah juga menerapkan Asesmen Nasional sebagai pengganti Ujian Nasional untuk mengukur literasi membaca dan numerasi siswa. Di Australia, pendekatan kebijakan lebih terstruktur melalui National Literacy and Numeracy Plan dan sistem evaluasi NAPLAN. Pemerintah federal dan negara bagian bekerja sama untuk menyusun kebijakan yang seragam, dengan fokus pada peningkatan hasil belajar dan kesetaraan. Sistem pendidikan nasional adalah suatu rangkaian kegiatan penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung dalam skala nasional, di mana setiap komponennya saling mendukung untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.⁵

Sistem pendidikan Indonesia mengalami perubahan kebijakan yang cukup signifikan, khususnya melalui peluncuran program Merdeka Belajar oleh Kemendikbudristek. menekankan pembelajaran yang fleksibel, relevan, dan berpusat pada peserta didik. Tujuan utamanya adalah menciptakan iklim belajar yang lebih merdeka, tidak terbelenggu oleh pendekatan administratif yang kaku, serta lebih fokus pada pengembangan kompetensi esensial siswa, terutama literasi dan numerasi. Sebagai bagian dari program Merdeka Belajar, pemerintah meluncurkan Kurikulum Merdeka yang memberikan ruang bagi sekolah dan guru untuk merancang pembelajaran sesuai dengan konteks dan kebutuhan siswa. Kurikulum ini menekankan pembelajaran yang berbasis proyek, pembelajaran berdiferensiasi, serta penguatan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila. Dengan struktur yang lebih fleksibel dan pemetaan capaian pembelajaran yang tidak terlalu ketat, Kurikulum Merdeka memungkinkan terjadinya penguatan literasi dan numerasi secara lebih

⁵ Munirah Munirah, "Sistem Pendidikan di Indonesia: antara keinginan dan realita," *AULADUNA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 2.2 (2015), 233-45.

kontekstual dan bermakna.⁶ Namun, pelaksanaan program ini menghadapi tantangan di lapangan, seperti ketimpangan kesiapan antarsekolah, keterbatasan pemahaman guru terhadap konsep kurikulum baru, serta minimnya pelatihan implementatif yang merata.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan inovasi dalam dunia pendidikan melalui pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar yang bertujuan untuk membekali peserta didik dengan kompetensi yang relevan terhadap perkembangan zaman. Setiap pembaruan kurikulum harus didasarkan pada landasan yang kuat, baik melalui hasil penelitian maupun kajian teoritis yang mendalam. Karena bersifat dinamis, kurikulum harus terus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik serta perubahan sosial dan teknologi yang terus berkembang. Implementasi Kurikulum Merdeka masih dilakukan secara bertahap dan belum diterapkan secara serentak di seluruh satuan pendidikan.⁷ Australia telah lama menjadikan literasi dan numerasi sebagai prioritas utama dalam sistem pendidikannya. Hal ini diwujudkan melalui kebijakan nasional yang disebut National Literacy and Numeracy Plan, yang dikembangkan untuk memastikan bahwa setiap siswa mencapai standar minimum dalam membaca, menulis, dan berhitung pada setiap tahap penting dalam pendidikan dasar. Salah satu pilar penting dalam pelaksanaan rencana ini adalah NAPLAN (National Assessment Program-Literacy and Numeracy), yang diperkenalkan pada tahun 2008.⁸

Salah satu keunggulan dari sistem ini adalah penggunaan data berbasis bukti untuk merancang kebijakan pendidikan yang lebih terarah. Misalnya, wilayah dengan capaian rendah dalam numerasi akan menerima dukungan tambahan berupa program remedial dan pelatihan guru. Meskipun NAPLAN memberikan kontribusi signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pendidikan, asesmen ini juga mendapat kritik, terutama terkait tekanan psikologis pada siswa dan kecenderungan sekolah untuk *teaching to the test*. Australia dan Indonesia sama-sama menunjukkan perhatian terhadap peningkatan kualitas pendidikan nasional, khususnya dalam literasi dan numerasi. Namun, pendekatan keduanya memiliki perbedaan signifikan dalam hal perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan berbasis data. Australia memiliki sistem pendidikan yang sangat terstandardisasi dan berbasis bukti (*evidence-based*). Negara ini menggunakan berbagai bentuk asesmen nasional seperti NAPLAN (National Assessment Program-Literacy and Numeracy), yang secara rutin mengukur kemampuan siswa pada berbagai jenjang pendidikan dalam literasi dan numerasi.

Pemerintah Australia juga secara konsisten menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, termasuk melalui pelaporan hasil pendidikan secara terbuka kepada publik. Hal ini memperkuat budaya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan di seluruh sistem. Tujuan utamanya sejalan dengan Australia, yaitu menyediakan

⁶ Pat Kurniati et al., "Model proses inovasi kurikulum merdeka implikasinya bagi siswa dan guru abad 21," *Jurnal Citizenship Virtues*, 2.2 (2022), 408–23.

⁷ Leni Nurindah Lailatul Fitriana et al., "Kebijakan pokok dan strategi implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Indonesia," *Journal on Teacher education*, 4.2 (2022), 1505–11.

⁸ Yaya Jakaria et al., "Peningkatan derajat manusia melalui pendidikan" (Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendikbud, 2018).

gambaran menyeluruh mengenai kondisi pembelajaran di sekolah. Namun, tantangan utama Indonesia terletak pada implementasi, antara lain:

- a. Belum meratanya pemahaman guru dan kepala sekolah terhadap pentingnya data dalam pengambilan keputusan pendidikan.
- b. Infrastruktur teknologi dan kapasitas manajerial sekolah yang belum seragam.
- c. Ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah yang memperbesar kesenjangan dalam pemanfaatan data asesmen secara optimal.⁹

Selain itu, tidak semua sekolah memiliki akses atau pelatihan untuk menganalisis dan menindaklanjuti hasil asesmen, sehingga kebijakan berbasis data belum sepenuhnya efektif dijalankan di level satuan pendidikan. Dengan kata lain, Australia telah membangun sistem yang mapan dalam menggunakan data untuk perbaikan pendidikan, sedangkan Indonesia masih berada dalam proses transisi dan penguatan kapasitas agar data tidak hanya dikumpulkan, tetapi juga dimanfaatkan secara strategis dalam praktik pengajaran dan kebijakan.

Metode Pembelajaran di Sekolah Dasar

Metode pengajaran literasi dan numerasi di sekolah dasar Indonesia masih bervariasi. Beberapa sekolah telah menerapkan pendekatan berbasis proyek dan kontekstual, namun banyak pula yang masih mengandalkan metode tradisional. Kurangnya sumber daya dan pelatihan menjadi hambatan utama. Sementara itu, Australia cenderung mengadopsi pembelajaran berbasis inkuiri, penggunaan teknologi, dan integrasi literasi-numerasi dalam berbagai mata pelajaran. Pendekatan ini terbukti meningkatkan keterlibatan siswa dan pemahaman konseptual mereka. Sistem pendidikan di Indonesia saat ini berada dalam fase transisi penting, dari pendekatan pembelajaran tradisional berbasis hafalan (*rote learning*) menuju pendekatan aktif, partisipatif, dan berbasis kompetensi. Perubahan ini sejalan dengan kebijakan Kurikulum Merdeka dan filosofi *Merdeka Belajar* yang mengutamakan pemahaman konsep, berpikir kritis, dan pembelajaran bermakna. Namun, proses transformasi ini tidak berjalan mudah dan merata di seluruh wilayah.

Sebagian besar sekolah di Indonesia, terutama di daerah-daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), masih sangat dipengaruhi oleh budaya pembelajaran konvensional, di mana guru menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, dan keberhasilan siswa diukur dari kemampuan menghafal materi. Hal ini dipengaruhi oleh sistem evaluasi masa lalu, keterbatasan pelatihan guru, serta ekspektasi masyarakat terhadap nilai ujian.¹⁰ Perubahan ke metode pembelajaran aktif menuntut guru untuk mengubah pola pikir dan strategi mengajar, termasuk mendorong diskusi terbuka, pemecahan masalah, kolaborasi, dan pendekatan kontekstual yang relevan dengan kehidupan siswa. Namun, transisi ini sering menghadapi hambatan karena:

⁹ Mohammad Ali, *Pendidikan untuk pembangunan nasional: menuju bangsa Indonesia yang mandiri dan berdaya saing tinggi* (Grasindo, 2009).

¹⁰ Yance Z Rumahuru et al., *Transformasi Budaya Pembelajaran Era Kenormalan Baru Pasca Covid-19* (Penerbit Adab, 2021).

- a. Keterbatasan pelatihan profesional untuk guru dalam menerapkan metode aktif berbasis kompetensi.
- b. Minimnya fasilitas dan sumber daya pembelajaran di sekolah-sekolah nonperkotaan.
- c. Kesenjangan pemahaman antara kebijakan pusat dan praktik lokal, terutama terkait konsep literasi dan numerasi kontekstual.

Selain itu, keberagaman sosial dan budaya Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pendidikan. Setiap daerah memiliki latar belakang bahasa, nilai, dan norma lokal yang berbeda, sehingga pendekatan pembelajaran tidak bisa disamaratakan. Kurikulum nasional harus diterjemahkan ke dalam praktik kelas yang mempertimbangkan konteks lokal, tanpa mengabaikan standar kompetensi nasional. Sebagai contoh, dalam penguatan literasi, siswa dari daerah dengan bahasa ibu yang berbeda dengan Bahasa Indonesia mengalami kesulitan dalam memahami teks bacaan standar. Sementara itu, dalam konteks numerasi, pemahaman konsep matematika sering kali tidak dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi abstrak dan sulit dicerna.¹¹

Pendidikan di Australia dikenal dengan pendekatannya yang berfokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah melalui pembelajaran berbasis inkuiri. Pendekatan ini mendorong siswa untuk aktif mencari informasi, mengeksplorasi ide-ide baru, dan mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep yang dipelajari. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, tetapi juga pada pengembangan keterampilan berpikir yang lebih tinggi, termasuk kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menyelesaikan masalah secara kreatif.¹² Salah satu karakteristik penting dari sistem pendidikan di Australia adalah penerapan model pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*), yang mengharuskan siswa untuk bekerja dalam kelompok untuk memecahkan masalah yang kompleks dan relevan dengan kehidupan nyata. Pembelajaran ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat dalam penelitian, eksperimen, dan diskusi, serta meningkatkan kemampuan mereka dalam berpikir kritis dan kolaborasi. Dalam konteks ini, literasi dan numerasi tidak hanya dilihat sebagai keterampilan dasar, tetapi sebagai alat untuk mengembangkan kompetensi yang lebih kompleks dan aplikatif. Australia juga mengintegrasikan kurikulum berbasis kompetensi, di mana siswa dinilai berdasarkan kemampuan mereka dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai situasi yang beragam. Oleh karena itu, asesmen dalam sistem pendidikan Australia lebih berfokus pada kemampuan siswa dalam menghubungkan teori dengan praktik, serta pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi.¹³

Australia cenderung lebih sistematis dalam pendekatan pembelajarannya, dengan kurikulum yang jelas dan terstruktur secara nasional, serta penerapan metode

¹¹ I Nengah Sueca, *Literasi Dasar: Bahan Literasi Berbasis Permainan Bahasa* (Nilacakra, 2021).

¹² Gillian Kidman dan Niranjana Casinader, "Inquiry-based teaching and learning across disciplines," *London: Palgrave Pivot*, 10 (2017), 971–78.

¹³ Ahmad Gufron, Iwan Junaedi, dan Mulyono Mulyono, "Kurikulum Matematika Australia: Tinjauan Sistematis tentang Konteks, Konten dan Proses," *Jurnal Syntax Admiration*, 6.1 (2025), 128–47.

pembelajaran yang seragam di seluruh negara bagian. Sistem ini memungkinkan adanya standar yang konsisten dalam pencapaian hasil pendidikan di berbagai daerah. Pendekatan berbasis inkuiri dan pemecahan masalah juga diterapkan secara merata, memberikan pengalaman belajar yang serupa bagi siswa di berbagai wilayah. Setiap daerah di Indonesia memiliki kebutuhan yang berbeda, yang berpengaruh pada praktik pengajaran, sehingga kurikulum di beberapa daerah mungkin lebih variatif dan disesuaikan dengan kondisi setempat. Sebagai contoh, daerah-daerah dengan akses terbatas terhadap teknologi mungkin lebih fokus pada pembelajaran berbasis konvensional, sementara daerah yang lebih maju secara teknologi dapat mengoptimalkan pembelajaran berbasis digital. Di Indonesia, ini diwujudkan melalui program Asesmen Nasional, yang menilai kemampuan literasi dan numerasi siswa. Sementara di Australia, asesmen berfokus pada kemampuan pemecahan masalah dan keterampilan berpikir kritis yang lebih aplikatif.

Peran Guru dan Kualitas Pengajaran

Guru merupakan aktor kunci dalam pengembangan literasi dan numerasi. Di Australia, pengembangan profesional guru dilakukan secara berkala melalui lembaga seperti AITSL, yang menyediakan standar kompetensi dan pelatihan berkelanjutan. Indonesia menghadapi tantangan dalam hal pemerataan kualitas guru, terutama di daerah terpencil. Meskipun pemerintah telah menyediakan program pelatihan, keterbatasan infrastruktur dan akses informasi seringkali menjadi kendala. Pengembangan profesional guru di Australia lebih berkelanjutan dan terstruktur. Pelatihan bagi pendidik di Indonesia, meskipun penting dalam rangka mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan, masih banyak bersifat top-down dan belum merata dalam hal kualitas. Pendekatan top-down berarti kebijakan pelatihan sering kali ditentukan oleh pemerintah pusat, dengan sedikit ruang bagi guru dan sekolah untuk berpartisipasi dalam merancang atau menyesuaikan program pelatihan sesuai dengan kebutuhan lokal atau konteks masing-masing. Model pelatihan ini cenderung mengarah pada penyebaran informasi dan instruksi secara satu arah, dari pusat ke daerah, tanpa adanya proses diskusi atau umpan balik yang konstruktif dari pelaksana di lapangan.

Di satu sisi, kebijakan ini memudahkan penyebaran standar yang seragam, tetapi di sisi lain, kualitas pelatihan yang diberikan seringkali tidak konsisten, baik dari segi materi, metode pengajaran, maupun kompetensi fasilitator pelatihan itu sendiri. Sebagai akibatnya, tidak semua guru mendapatkan kesempatan pelatihan yang relevan dan berkualitas tinggi. Selain itu, keterbatasan sumber daya, kurangnya akses ke materi pelatihan yang terus diperbarui, serta kendala waktu dan anggaran yang terbatas seringkali menghambat keberhasilan program pelatihan ini. Pada kenyataannya, ada disparitas yang besar antara guru di perkotaan dan daerah terpencil terkait kualitas pelatihan yang mereka terima. Guru di daerah terpencil cenderung memiliki keterbatasan dalam mengakses pelatihan yang berkualitas, sementara guru di daerah perkotaan lebih sering mendapat kesempatan untuk

mengikuti pelatihan dengan kualitas lebih baik dan fasilitas yang lebih lengkap.¹⁴ Ketimpangan kualitas pendidikan di berbagai daerah, terutama antara daerah perkotaan dan daerah pedalaman atau tertinggal, menjadi isu yang sangat kompleks. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah kurangnya akses terhadap guru berkualitas di wilayah-wilayah tersebut, yang berujung pada ketidakmerataan kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Di daerah tertinggal, seringkali terdapat kesulitan dalam menarik dan mempertahankan tenaga pengajar yang memiliki kualifikasi tinggi.¹⁵ Sementara itu, pelatihan guru menjadi aspek penting untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mengimplementasikan kurikulum baru, seperti Kurikulum Merdeka, yang menuntut pendekatan pembelajaran lebih fleksibel dan berbasis pada kebutuhan siswa. Tanpa pelatihan yang memadai, terutama di daerah yang jauh dari pusat pelatihan, guru akan kesulitan mengaplikasikan konsep-konsep baru tersebut dalam pembelajaran sehari-hari. Beberapa langkah yang bisa diambil untuk mengatasi tantangan ini antara lain:

- 1) Penguatan distribusi guru melalui program Pendidikan dan Pelatihan Guru di Daerah Terpencil dan pemberian tunjangan daerah khusus yang lebih besar.
- 2) Pendekatan berbasis teknologi untuk memberikan pelatihan online atau webinar yang dapat diakses oleh guru di daerah-daerah sulit.
- 3) Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan sistem insentif yang menarik bagi guru untuk bekerja di daerah tertinggal.

Dengan adanya kebijakan yang tepat, serta upaya yang lebih terarah dalam mendistribusikan guru berkualitas dan memberikan pelatihan yang terus-menerus, diharapkan kualitas pendidikan di daerah tertinggal dapat meningkat, sehingga siswa di seluruh Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas.¹⁶

Evaluasi dan Asesmen

Australia menggunakan NAPLAN sebagai sistem evaluasi nasional untuk menilai kemampuan literasi dan numerasi siswa secara berkala. Hasil evaluasi digunakan untuk merancang kebijakan pendidikan dan intervensi pembelajaran. Indonesia melalui Asesmen Nasional mulai mengukur literasi dan numerasi secara lebih komprehensif. Namun, integrasi hasil asesmen ke dalam praktik pembelajaran masih memerlukan penguatan, baik dari sisi kapasitas sekolah maupun guru. Australia memiliki sistem penilaian nasional yang mapan melalui program NAPLAN (National Assessment Program-Literacy and Numeracy), yang telah dijalankan sejak tahun 2008 oleh Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority (ACARA). NAPLAN dirancang untuk mengukur keterampilan dasar siswa dalam literasi membaca, menulis, dan numerasi, yang dinilai secara berkala pada siswa di

¹⁴ Hendrik Dewantara, *Membangun Masa Depan Pendidikan: Inovasi dan Tantangan dalam Sertifikasi Guru di Indonesia* (PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024).

¹⁵ Yudha Maya Septiana, Solfema Solfema, dan Lili Dasa Putri, "Upaya dalam Pemerataan Pendidikan di Daerah Terpencil," *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, 2.6 (2024), 162–69.

¹⁶ Elisa Rosa et al., "Inovasi Model dan Strategi Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Merdeka: Inovasi Model dan Strategi Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Merdeka," *Journal of Education Research*, 5.3 (2024), 2608–17.

Tahun 3, 5, 7, dan 9 (usia sekitar 8–14 tahun). Berbeda dengan pendekatan asesmen di Indonesia yang baru-baru ini diperkenalkan melalui Asesmen Nasional, Australia telah lama memanfaatkan data hasil NAPLAN sebagai basis pengambilan kebijakan pendidikan secara nasional. Hasil NAPLAN digunakan untuk:

- 1) Mengevaluasi efektivitas sekolah dan sistem pendidikan negara bagian/teritori.
- 2) Memberikan umpan balik kepada guru, orang tua, dan pembuat kebijakan tentang kekuatan dan kelemahan siswa.
- 3) Merancang program intervensi pendidikan sejak dini, serta
- 4) Memantau kesenjangan pendidikan antarkelompok sosial, termasuk siswa dari latar belakang non-Inggris atau komunitas Aborigin dan Torres Strait Islander.

Kelebihan sistem ini terletak pada keberlanjutannya dan keterpaduan antara asesmen, kurikulum, dan kebijakan pendidikan. Karena dilakukan secara berulang dan terstandar, NAPLAN memberi data longitudinal yang kuat bagi pemerintah untuk merancang kebijakan pendidikan berbasis bukti (*evidence-based policy*), termasuk pengalokasian dana, pengembangan kurikulum, serta pelatihan guru. Namun, NAPLAN juga mendapat kritik, terutama terkait tekanan berlebih terhadap siswa dan guru menjelang pelaksanaan ujian, serta risiko berfokus pada *teaching to the test*. Meski demikian, secara umum, NAPLAN tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga standar nasional pendidikan Australia dan memandu arah reformasi.

Sejak tahun 2021, Indonesia secara resmi menggantikan Ujian Nasional (UN) dengan Asesmen Nasional (AN). Pergantian ini menandai perubahan paradigma dalam evaluasi pendidikan: dari yang sebelumnya berorientasi pada penguasaan konten semata menjadi berfokus pada pengukuran kompetensi esensial dan lingkungan belajar. Asesmen Nasional dirancang bukan untuk mengevaluasi prestasi individu siswa, melainkan untuk memotret kualitas pendidikan secara menyeluruh di tingkat satuan pendidikan dan sistem. Asesmen Nasional terdiri dari tiga komponen utama:

- 1) Asesmen Kompetensi Minimum (AKM). Mengukur kemampuan literasi membaca dan numerasi yang kontekstual dan aplikatif.
- 2) Survei Karakter. Mengidentifikasi nilai-nilai karakter yang mencerminkan Profil Pelajar Pancasila.
- 3) Survei Lingkungan Belajar. Menggali kondisi ekosistem belajar dari perspektif siswa, guru, dan kepala sekolah.

Saat ini, banyak sekolah dan guru masih memerlukan pendampingan dalam memahami dan menindaklanjuti hasil asesmen, baik dalam bentuk AKM maupun survei lingkungan belajar.¹⁷ Dalam hal ini, Indonesia dapat belajar dari pendekatan Australia tentang bagaimana hasil asesmen dapat diterjemahkan menjadi tindakan konkret di tingkat kebijakan, manajemen sekolah, dan praktik kelas.

¹⁷ M Miftah Farid, "Pergeseran Paradigma Ujian Nasional Ke Asesmen Nasional Pada Masa Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nadim A. Makarim," *Pendidikan Humanis: Penilaian Pendidikan Di Sekolah*, 113 (2022).

Tantangan dan Inovasi

Indonesia menghadapi tantangan besar berupa kesenjangan antar wilayah, keterbatasan fasilitas, serta ketimpangan kualitas tenaga pengajar. Untuk mengatasi hal ini, beberapa inovasi seperti platform digital telah diperkenalkan. Di Australia, meskipun infrastrukturnya lebih maju, tantangan tetap ada pada komunitas terpencil dan kelompok masyarakat adat. Program intervensi khusus dan pendampingan berbasis komunitas menjadi solusi inovatif. Pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hal pemerataan, terutama terkait kesenjangan antarwilayah, keterbatasan sarana belajar, dan ketimpangan sumber daya manusia.

Pertama, sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau, akses pendidikan di daerah terpencil dan 3T (terdepan, terluar, tertinggal) menjadi tantangan utama. Wilayah-wilayah seperti Papua, NTT, dan sebagian Kalimantan masih menghadapi hambatan dalam ketersediaan sekolah, infrastruktur teknologi, serta distribusi buku dan bahan ajar. Studi oleh Kemendikbudristek menunjukkan bahwa angka partisipasi kasar (APK) dan angka melek huruf di wilayah timur Indonesia masih jauh tertinggal dibanding wilayah barat.¹⁸ Kedua, ketimpangan kualifikasi dan distribusi guru menjadi hambatan signifikan. Banyak daerah terpencil kekurangan guru berkualifikasi, sementara di kota besar terjadi kelebihan tenaga pengajar. Ketiga, keterbatasan akses terhadap teknologi dan internet memperdalam kesenjangan. Meskipun Australia memiliki sistem pendidikan yang lebih mapan, negara ini juga menghadapi kesenjangan yang signifikan, terutama antara komunitas urban dan rural, serta antara siswa non-pribumi dan Indigenous Australians (penduduk Aborigin dan Torres Strait Islander). Penelitian menunjukkan bahwa siswa dari daerah pedesaan dan terpencil cenderung memiliki capaian pendidikan yang lebih rendah, angka putus sekolah yang lebih tinggi, dan keterbatasan akses terhadap guru berkualitas dan fasilitas pendidikan modern.¹⁹ Pemerintah Australia telah merancang berbagai kebijakan seperti Remote School Attendance Strategy dan Aboriginal and Torres Strait Islander Education Action Plan, namun hasilnya masih beragam dan memerlukan evaluasi berkelanjutan. Baik Indonesia maupun Australia telah mengembangkan sejumlah inovasi pendidikan untuk mengatasi ketimpangan:

- a. Digitalisasi pembelajaran. Pengembangan platform Merdeka Mengajar, Rumah Belajar, dan AKM digital menjadi bagian dari strategi transformasi digital pendidikan. Australia mengembangkan sistem online learning portals seperti Scootle, dan integrasi teknologi di sekolah rural melalui Distance Education Centres.
- b. Program intervensi dini. Indonesia mendorong pelatihan guru, literasi kelas awal, serta integrasi hasil AKM dalam perencanaan pembelajaran. Australia memiliki program seperti Early Years Learning Framework dan Closing the Gap, yang menargetkan intervensi sejak pendidikan anak usia dini (PAUD) di komunitas berisiko.

¹⁸ Wihana Kirana Jaya, *Ekonomi Kelembagaan: Studi Kasus pada Transportasi Pedesaan dan Dampak Covid-19* (PT Elex Media Komputindo, 2021).

¹⁹ Asep Idin, Nurlaela Nurlaela, dan Iis Marwan, "Disparitas Kualitas Guru dalam Pendidikan," *Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2.3 (2024), 193–201.

- c. Kolaborasi lintas sektor. Kedua negara mengembangkan pendekatan kolaboratif antara sekolah, pemerintah, LSM, dan sektor swasta. Di Indonesia, program CSR pendidikan dan pelibatan masyarakat lokal menjadi bagian dari strategi penguatan sekolah. Di Australia, community schooling models telah dikembangkan untuk menyatukan layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial di wilayah terpencil.²⁰

KESIMPULAN

Indonesia dan Australia sama-sama menaruh perhatian besar terhadap peningkatan kualitas pendidikan, khususnya dalam pengembangan literasi dan numerasi. Di Indonesia, kebijakan tersebut difokuskan melalui program Merdeka Belajar dan Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran kontekstual, fleksibel, dan berpihak pada murid. Pemerintah juga telah menggantikan Ujian Nasional dengan Asesmen Nasional yang berfokus pada pengukuran literasi membaca, numerasi, karakter, dan lingkungan belajar. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam kesenjangan implementasi antarwilayah, keterbatasan pelatihan guru, serta rendahnya pemanfaatan data asesmen untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti. Sebaliknya, Australia memiliki sistem pendidikan yang lebih terstruktur dan terstandar secara nasional melalui kebijakan seperti National Literacy and Numeracy Plan serta asesmen NAPLAN yang dilakukan secara berkala sejak tahun 2008. Pendekatan Australia bersifat evidence-based, dengan pemanfaatan hasil asesmen secara luas untuk merancang kebijakan, intervensi pendidikan, serta pengembangan kurikulum dan pelatihan guru. Perbedaan utama terletak pada kesiapan sistem, pemerataan kualitas guru, dan pemanfaatan hasil evaluasi. Australia unggul dalam pelatihan profesional guru yang berkelanjutan dan sistematis melalui lembaga seperti AITSL, sementara Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pemerataan akses pelatihan, terutama di daerah tertinggal. Indonesia telah berinovasi melalui platform digital seperti Rapor Pendidikan dan Platform Merdeka Mengajar, namun pelaksanaannya memerlukan penguatan infrastruktur dan kapasitas SDM. Namun, Australia lebih konsisten dalam menerapkan pendekatan berbasis inkuiri dan problem-based learning secara merata di seluruh wilayah, sementara Indonesia masih dalam tahap penyesuaian dan adaptasi. Dengan belajar dari pendekatan sistematis Australia dan terus memperkuat infrastruktur, kapasitas guru, serta budaya evaluasi, Indonesia berpeluang untuk mempercepat transformasi pendidikan dan meningkatkan capaian literasi serta numerasi siswa secara lebih merata dan berkelanjutan.

REFERENSI

Ali, Mohammad, *Pendidikan untuk pembangunan Nasional: Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi* (Grasindo, 2009)

²⁰ Endang Sutisna Sulaiman, *Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan: Teori dan implementasi* (Ugm Press, 2021).

- Farid, M Miftah, "Pergeseran Paradigma Ujian Nasional ke Asesmen Nasional pada Masa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadim A. Makarim," *Pendidikan Humanis: Penilaian Pendidikan Di Sekolah*, 113 (2022)
- Fitriana, Leni Nurindah Lailatul, Nur Ahid, Guntur Eko Prasetyo, dan Iin Daratista, "Kebijakan Pokok dan Strategi Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Indonesia," *Journal on Teacher education*, 4.2 (2022), 1505-11
- Gufon, Ahmad, Iwan Junaedi, dan Mulyono, "Kurikulum Matematika Australia: Tinjauan Sistematis tentang Konteks, Konten dan Proses," *Jurnal Syntax Admiration*, 6.1 (2025), 128-47
- Gunawan, Rilla Gina, Eri Rozika, Rusdinal Rusdinal, Nurhizrah Gistituati, dan Azwar Ananda, "Studi Komparatif Kurikulum Matematika Sekolah Dasar Indonesia dan Australia," *Jurnal Education And Development*, 12.1 (2024), 401-7
- Hendrik Dewantara, *Membangun Masa Depan Pendidikan: Inovasi dan Tantangan dalam Sertifikasi Guru di Indonesia* (PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024)
- Idin, Asep, Nurlaela, dan Iis Marwan, "Disparitas Kualitas Guru dalam Pendidikan," *Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2.3 (2024), 193-201
- Ilyas, Muhammad, Marufi, dan Nisraeni, "Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika" (Pustaka Ramadhan, 2015)
- Jakaria, Yaya, Agung Purwadi, Yufridawati, Asri Ika Dwi Martini, Yunita Murdiyaningrum, dan Philip Suprastowo, "Peningkatan Derajat Manusia melalui Pendidikan" (Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendikbud, 2018)
- Jaya, Wihana Kirana, *Ekonomi Kelembagaan: Studi Kasus pada Transportasi Pedesaan dan Dampak Covid-19* (PT Elex Media Komputindo, 2021)
- Kidman, Gillian, dan Niranjana Casinader, "Inquiry-Based Teaching and Learning Across Disciplines," *London: Palgrave Pivot*, 10 (2017), 971-78
- Kurniati, Pat, Andjela Lenora Kelmaskouw, Ahmad Deing, Bonin, dan Bambang Agus Haryanto, "Model Proses Inovasi Kurikulum Merdeka Implikasinya bagi Siswa dan Guru Abad 21," *Jurnal Citizenship Virtues*, 2.2 (2022), 408-23
- Muhtadi, Dedi, Iwan Junaedi, dan Mulyono, "Studi Komparatif Kurikulum Matematika Sekolah Menengah Indonesia dan Turki," *Journal of Authentic Research on Mathematics Education (JARME)*, 3.2 (2021), 126-33
- Munirah, "Sistem Pendidikan di Indonesia: Antara Keinginan dan Realita," *AULADUNA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 2.2 (2015), 233-45
- Murdiyani, Nila Mareta, *Kajian Pendidikan Matematika Internasional* (UNY Press, 2020)
- PISA, OECD, "PISA 2018 Result (Volume I): What Student Know and Can Do" (Paris: OECD Publishing, 2019)
- Rosa, Elisa, Rangga Destian, Andy Agustian, dan Wahyudin, "Inovasi Model dan Strategi Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Merdeka" *Journal of Education Research*, 5.3 (2024), 2608-17
- Rumahuru, Yance Z, Agusthina Siahaya, M Th, dan Jenri Ambarita, *Transformasi Budaya Pembelajaran Era Kenormalan Baru Pasca Covid-19* (Penerbit Adab, 2021)
- Saragih, Elianti Nurminah, *Serentak Bergerak, Wujudkan Merdeka Belajar*

- (Deepublish, 2021)
- Septiana, Yudha Maya, Solfema Solfema, dan Lili Dasa Putri, “Upaya dalam Pemerataan Pendidikan di Daerah Terpencil,” *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, 2.6 (2024), 162–69
- Sudarisman, Suciati, “Memahami Hakikat dan Karakteristik Pembelajaran Biologi dalam Upaya Menjawab Tantangan Abad 21 serta optimalisasi Implementasi Kurikulum 2013,” *Florea: Jurnal Biologi dan Pembelajarannya*, 2.1 (2015)
- Sueca, I Nengah, *Literasi Dasar: Bahan Literasi Berbasis Permainan Bahasa* (Nilacakra, 2021)
- Sulaiman, Endang Sutisna, *Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan: Teori dan Implementasi* (UGM Press, 2021)
- Winata, Anggun, Ifa Seftia Rakhma Widiyanti, dan Sri Cacik, “Analisis Kemampuan Numerasi dalam pengembangan Soal Asesmen Kemampuan Minimal pada Siswa Kelas XI SMA untuk Menyelesaikan Permasalahan Science,” *Jurnal Educatio Fkip Unma*, 7.2 (2021), 498–508